

Warga Kandangnumpang Demo Pembangunan Jalan Tol

LEBAK (IM) - Puluhan warga di Kampung Kandangnumpang, Desa Pasarkeong, Kecamatan Ci-badak, Kabupaten Lebak, melaksanakan aksi demonstrasi di Jalan Tol Serang-Panimbang.

Mereka menuntut pelaksanaan pembangunan jalan tol memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terdampak proyek strategis nasional tersebut.

Ketua RT/RW 2/4, Hasim mengatakan, masyarakat menuntut pelaksanaan pembangunan jalan tol memberikan ganti rugi kepada masyarakat.

Karena, 10 unit rumah warga retak-retak akibat pembangunan jalan tol.

Dari mulai awal pembangunan sampai sekarang, masyarakat mengeluhkan

polusi udara, bising, dan getaran dari aktivitas di jalan tol.

"Tiap malam, kami enggak bisa tidur. Bahkan, burung peliharaan pun mati akibat polusi dan suara bising dari pembangunan jalan tol," kata Hasim kepada wartawan, Senin (14/6).

Humas PT Wika Serang Panimbang, Heri Naryana mengatakan, tidak bisa memberikan statement apapun terkait aspirasi masyarakat.

Karena, aksi tersebut di surat yang dilayangkan masyarakat dilakukan pada 14 Juli 2021.

"Kita belum bisa memberikan respons apa-apa. Karena seharusnya aksi ini dilaksanakan 14 Juli, bukan sekarang," ungkapnya singkat. ● **pra**

25 Pedagang Pasar Kelapa Dua Tangerang Positif Covid-19

TANGERANG (IM) - Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang meningkatkan upaya tracing dan testing di wilayah kecamatan Kelapa Dua, Kelurahan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Hal itu, menyusul lonjakan 90 kasus positif di RW 06 Kelapa Dua.

"Dua hari lalu kita testing, swab sebanyak 175 pedagang, dan ditemukan 25 orang pedagang yang positif Covid-19," kata Juru bicara Satgas Covid-19, Hendra Tarmizi dikonfirmasi Senin (14/6).

Atas temuan tersebut, Pasar Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dituntut sementara hingga tiga hari ke depan. Selanjutnya, Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang, juga kembali melanjutkan tracing di lokasi pasar dengan 400 alat swab Antigen yang disiapkan.

"Hari ini kita lakukan lagi, dengan 400 alat Swab Antigen. Kami minta pedagang di sana juga mau melakukan tes. Dalam 2 sampai 3 hari ke depan hasilnya baru keluar," jelas Hendra.

Sementara, lokasi Pasar Kelapa Dua memang tidak jauh dari wilayah RW06, yang menerapkan lockdown mikro bagi warganya setelah 90 kasus merebak di wilayah itu.

Dia memastikan ke-25 pedagang di Pasar Kelapa Dua yang terkonfirmasi positif itu, berstatus Orang Tanpa Gejala atau OTG. Untuk itu, karantina kepada pedagang tersebut, dilakukan di Hotel Yasmin dan rumah warga masing-masing.

"Semuanya OTG, jadi dibagi, sebagian melakukan isolasi mandiri di rumah, lainnya di Hotel Yasmin," tutup Hendra. ● **pp**



HARI DONOR DARAH SEDUNIA

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Solo memakai topi bertuliskan World Blood Donor Day di gedung PMI setempat, Solo, Jawa Tengah, Senin (14/6). Kegiatan tersebut untuk memperingati Hari Donor Darah Sedunia.

Gubernur Banten: Jangan Main-main, Ini Amanah!

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengingatkan agar 22 pejabat Dinkes Banten yang baru untuk bisa menjauhi korupsi. "Jangan lagi mengulangi seperti para pejabat terdahulu," kata WH.

SERANG (IM) - Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) secara resmi melantik 22 pejabat Dinkes Provinsi Banten di lapangan kantor Dinkes Banten, KP3B Curug Kota Serang, Senin (14/6).

Dari 22 pejabat baru itu, 20 di antaranya merupakan hasil seleksi terhadap peserta yang mengikuti proses pengisian jabatan terbuka yang ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya lantaran mengundurkan diri secara massal.

Sedangkan 2 pejabat sisanya merupakan hasil mutasi dari UPT (Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan UPT Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Banten.

Proses pengisian secara terbuka dilakukan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:

821.2/Kep.112-BKD/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Gubernur WH memberikan penekanan khusus kepada 22 pejabat yang baru dilantik tersebut.

"Jangan lagi-lagi mengulangi seperti para pejabat terdahulu," pesan WH.

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini melanjutkan, jabatan itu disumpah dan mempunyai tanggungjawab. Sebagai abdi negara ia harus mau ditugaskan di mana saja. "Makanya saya berpesan, tidak ada kemungkinan untuk toleransi lagi. Karena mereka yang sudah mundur itu pasti menyesal," tegas WH.

WH menambahkan, pejabat yang baru dilantik ini agar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan apapun konsekuensinya.

"Jangan main-main dengan saya," katanya. Orang nomor satu di Banten itu menegaskan,

pihaknya tak akan mentoleransi sikap-sikap tak bertanggung jawab atau lari dari tugas.

Sebab, jabatan pada dasarnya adalah amanah dan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu mereka harus bisa mendedikasikan dirinya.

Terlebih, jabatan yang diemban merupakan bidang terdepan dalam penanganan pandemik Covid-19.

"Ketika kalian tinggalkan itu dan kalian mundur kalian tidak bertanggung jawab, tidak punya etika, tidak punya kesantunan meninggalkan bangsa ini yang berjuang melawan Covid-19. Pahami itu," katanya.

Dia juga mengingatkan agar 22 pejabat Dinkes Banten yang baru untuk bisa menjauhi korupsi. Pasaunya, secara

material manusia tidak akan menemui kata cukup.

Kunci adalah bagaimana insan bisa menyukumi yang dimilikinya maka apapun yang dijalani akan terasa terucukupi pula.

"Itu pesan saya, camkan kepada saudara kita ubah Banten ini. Kalau tidak maka Banten tetap menjadi yang terbelakang," tuturnya. ● **pra**

BUNTOT PENGUNDURAN DIRI MASSAL

Wahidin Halim Pecat Empat ASN Dinkes Banten

SERANG (IM) - Empat pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang status Aparatur Sipil Negara (ASN) dipecat oleh Gubernur, Wahidin Halim. Pemecatan ini buntut pengunduran diri masal 20 PNS Dinkes Provinsi Banten.

Empat orang itu dipecat dengan alasan etika jabatan. Mereka dianggap telah memobilisasi ASN lainnya untuk ramai-ramai mengundurkan diri. "Alasannya melanggar etika jabatan, karena mempengaruhi, mengajak ASN lain mundur dari jabatan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Komarudin, Senin (14/6).

Komarudin mengungkapkan, salah satu pejabat yang dipecat adalah Sekretaris Dinkes. Tiga lainnya merupakan golongan eselon III dua orang dan eselon IV dua orang.

"Insial Ak, Wy, Mm, AR, Eselon III dua (orang), eselon IV dua (orang). Ya tadi sudah dijelaskan (provokator). Hari ini juga (dipecat)," jelasnya.

Kekosongan jabatan di Dinkes Banten telah diisi dengan pejabat baru hasil seleksi. Mereka dilantik langsung oleh Gubernur Banten di halaman Kantor Dinkes Banten.

Sebelumnya diberitakan, publik dikjutkan dengan pengunduran diri serentak 20 pe-

jabat eselon III dan IV. Dalam isi surat pengunduran diri, ada dua poin yang disampaikan kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten.

Poin pertama dalam surat berisi, "Selama ini kami telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi. Kondisi tersebut membuat kami bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan."

Poin kedua dalam surat tersebut berisi, "Sesuai perkembangan saat ini, rekan kami Ibu IS ditetapkan sebagai tersangka pengadaan masker untuk penanganan Covid-19. Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai perintah kepala Dinas Kesehatan. Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut kami merasa kecewa dan beresid karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan."

Atas kedua kondisi itu, para pejabat di Dinkes menyatakan sikap mengundurkan diri dari pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ada 20 pejabat eselon III dan IV yang menandatangani di atas materai.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menyalahkan pen-

gunduran diri 20 pejabat di lingkungan Dinkes Provinsi Banten di tengah pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan masker di instansi itu. Menurut mereka, langkah mereka sama dengan melarikan diri (desersi) dari tugas.

"Saya mengerti situasi keprihatinan para staf, eselon 3 dan 4 dengan ditahannya saudara Lia. Saya kira bentuk solidaritas ini bisa dipahami, namun masalah hukum ini sedang diproses dan ditegakkan oleh Kejati Banten. Dan kita harus memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan. Dan tentunya sebagai pimpinan saya juga prihatin," ujar Wahidin, Senin (31/5) malam.

Namun dia tidak bisa menoleransi pengunduran diri para pejabat Dinas Kesehatan. Alasannya, mereka terlalu gampang mengambil sikap itu di saat Pemprov Banten sedang menghadapi masa pandemi dan berusaha melindungi rakyat dengan sebaik-baiknya.

"Setelah sekilas, saya peajari pengunduran diri ini bukan semata-mata karena solidaritas karena temannya ditahan. Mereka-mereka adalah orang-orang lama yang kinerjanya sudah kita tahu tidak mau mengubah mindsetnya dengan upaya pemerintah provinsi dalam memerangi korupsi, sebut Wahidin. ● **pra**

SOAL BEBAN BIAYA APD DOKTER KE PASIEN

DPRD Bakal Panggil Dinkes Kota Tangerang

TANGERANG (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang akan memanggil Dinas Kesehatan untuk dimintai keterangan terkait salah satu rumah sakit swasta yang membebani pasien untuk membayar Alat Pelindung Diri (APD) dokter.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Senin (14/6).

Gatot Wibowo menerangkan, Dinas Kesehatan harus memberikan keterangan secara jelas soal salah satu rumah sakit swasta yang membebani biaya APD dokter kepada pasien.

"Kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Seharusnya ada sosialisasi yang diberikan ke masyarakat atau pasien yang hendak masuk ke rumah sakit," kata Gatot Wibowo seraya menambahkan, jangan sampai ketika pasien sudah masuk baru dikasih tahu jika ada beban biaya yang harus dibayarkan oleh pasien sudah larangan tidak ditanggung oleh APBN atau APBD.

"Hal seperti ini yang menimbulkan permasalahan atau miss komunikasi. DPRD melalui Komisi 2 akan memanggil Dinas Kesehatan secepatnya," pungkasnya.

Politisi dari PDI Perjuangan menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah bisa melakukan pembinaan atau koordinasi dengan rumah sakit swasta yang ada di Kota Tangerang.

Sebelumnya, Forum Aktis Tangerang Raya (FAKTA)

melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Jl. Jendral Ahmad Yani No.69, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.

Dalam aksinya, para aktivis membawa beberapa spanduk untuk menyuarakan aspirasi mereka, salah satunya bertuliskan "USUT TUNTAS MAFLA KESEHATAN", Jumat (11/6) lalu.

Banyak teriakan dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka menuntut Dinas Kesehatan harus berperan aktif dalam pengawasan kepada seluruh rumah sakit baik milik pemerintah ataupun swasta yang ada di Kota Tangerang.

Menurut Koordinator aksi, Iqbal Fadillah, Berdasarkan SK Walikota Tangerang Nomor: 445/KEP.320-DINKES/20 mengenai ketetapan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan, pembebasan biaya pasien Covid19 dan pengajuan klaim kepada pemerintah.

Namun kenyataan di lapangan, para aktivis tersebut menemukan salah satu rumah sakit swasta yang melayani pasien covid membebani biaya Alat Pelindung Diri (APD) Dokter kepada seluruh pasien rawat jalan dan inap yang datang untuk berobat dengan angka yang cukup tinggi kisaran Rp200 ribu per pasien.

"Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus segera melakukan tindakan Sanksi Hukum Administrasi yang sesuai perundang-undangan kepada rumah sakit tersebut," papar Iqbal. ● **pp**

ALAMI KENAikan KASUS

Pemkot Tangerang Minta Masyarakat Disiplin Prokes



ARIEF R WISMANSYAH
Wali Kota Tangerang

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya maksimal guna menekan angka penyebaran Covid-19 yang saat ini mengalami kenaikan kasus. Hal ini ditengarai lantaran semakin minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan pro-

tokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Wali Kota Tangerang, H. Arief R. Wisnansyah bergerak cepat menanggapi fenomena kenaikan kasus dengan menggelar rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh Camat dan Lurah se-Kota Tangerang.

"Sejak tanggal 7 Juni sampai 13 Juni 2021, kita telah melakukan testing dan tracing sebanyak 8.591 orang,"

"Hasilnya 341 orang terkonfirmasi positif Covid-19," ungkap Wali Kota dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara daring, Senin (14/6).

Kondisi ini, lanjut Wali Kota, secara langsung memberikan dampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) sejumlah Rumah Isolasi Terkonsentrasi (RII) dan juga

rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 yang ada di Kota Tangerang.

"BOR rumah sakit mencapai 77,65%, RIT mencapai 97,59% sedangkan ICU rumah sakit mencapai 75,40%," jelas Arief.

Lebih lanjut Arief berpesan agar seluruh jajaran Pemkot Tangerang lebih tegas dalam menindak masyarakat yang lalai dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui kegiatan Operasi Aman Bersama (OAB) yang kembali dilakukan agar jumlah kasus positif Covid dapat terkendali.

"Datang tempat - tempat yang rawan terjadi kerumunan, berikan teguran keras, karena jika terus lalai maka pandemi ini tidak akan selesai," pengukasnya. ● **joh**



IDN/ANTARA

EKSKAVASI SITUS ADAN-ADAN KEDIRI

Arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) mengukir lebar gentong saat ekskavasi di situs Adan-adan, Desa Adan-adan, Kediri, Jawa Timur, Senin (14/6). Ekskavasi pada jarak 500 meter dari induk candi Adan-adan peninggalan kerajaan Kadiri tersebut menemukan dua buah gentong dari batu andesit berukir struktur bangunan yang diperkirakan kawasan permukiman penduduk.

Polda Banten Gencarkan Program Sayang Anak Yatim

SERANG (IM) - Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggenakan program sayang anak yatim dengan membantu kemanusiaan agar Indonesia terlepas dari penyebaran pandemi Covid-19. "Kami meyakini bahwa membantu antar sesama manusia itu menjadikan kunci negeri ini lepas dari virus corona," kata Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto, Senin (14/6).

Program polisi sayang anak yatim yang digagas Polda Banten bertujuan ingin Indonesia terbebas dari penyebaran corona yang kini masih melanda dunia.

Di mana program ini berharap memberikan kekuatan agar Indonesia terlepas dari penyakit yang mematikan.

Dalam ajaran agama tentu diperintahkan untuk membantu kepada sesama manusia, termasuk menyayangi anak yatim, apalagi di tengah pandemi kehidupan beban mereka sangat berat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Karena itu, Kapolda Banten sendiri langsung mendatangi tempat kediaman Ade Kosasih (18), di Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, yang merupakan tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal.

Ade Kosasih, sebagai anak tertua harus menghidupi ibu dan lima adiknya.

Di masa normal, beban kehidupan Ade Kosasih yang

bekerja serabutan sangat berat, terlebih ditambah masa pandemi seperti sekarang ini.

Polda Banten ketika menerima informasi kehidupan Ade Kosasih, Kapolda dengan personel langsung membawa paket bingkisan di antaranya beras, gula, minyak goreng dan barang pokok lainnya guna meringankan beban ekonomi mereka.

Selain itu juga Kapolda Banten melihat lima adik Ade Kosasih yang masih berusia sekolah diberikan bantuan buku-buku dan alat tulis serta menyerahkan tabungan senilai Rp22 juta.

"Kami berharap bantuan itu dapat meringankan beban ekonomi keluarga Ade Kosasih," katanya.

Ia mengatakan, Kapolda Banten juga menyerahkan sebuah masker guna pengendalian Covid-19. Siapapun bisa terinfeksi virus corona sehingga semua warga harus patuh protokol kesehatan.

"Jadi jangan karena kondisi tertentu, seseorang tidak menjalankan protokol kesehatan. Kita semua harus disiplin agar mata rantai penularan Covid-29 bisa kita putus," kata jenderal bintang dua tersebut.

Polda Banten sendiri menggenakan 12 program pelayanan pada masyarakat di antaranya polisi sayang anak yatim.

"Kita harus bantu sesama, ini murni kemanusiaan," ujarnya. ● **pra**